

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku .

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amrah Muslimin, 2001, *Beberapa Azas-azas dan pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni Bandung.
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo.
- H.A.W. Widjaja, 2004, *Otonomi daerah dan daerah otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas-asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2016, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur.
- Lili, Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lutfi J. Kurniawan, 2017, *Hukum dan Kebijakan Publik Perihal Negara, Masyarakat Sipil dan Kearifan Lokal dalam Prespektif Politik Kesejahteraan*, Setara Press, Malang.

- Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 2001, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pendidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaidah, 2005, *Pemerintahan Daerah di Indonesia dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siswanto Sumarno, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung.
- _____, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- _____, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- Sri Soemantri, 2008, *Sistem- Sistem Pemerintah Negara-Negara Asean*, Transito, Bandung.

Yuliani, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan .

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Surat Edaran Nomor 202/BPDP-Pdg/IV/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Surat Edaran Nomor 200/471/KESBANGPOL/2020 tentang Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.

Surat Edaran Nomor 200/783/Kesbangpol-Pdg/XII-2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Surat Edaran Nomor 870.392/BPBD-Pdg/2002 tentang Pelaksanaan pesta Perkawinan damu Masa Pola Hidup Baru.

Surat Edaran Nomor 973/20.58/Bapenda/2020 tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Surat Edaran Nomor 870.238/BKPSDM-PDG/ 2020 tentang Penegakan Disiplin terhadap PNS yang melanggar Kewajiban Masuk Kerja dan menaati Ketentuan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Surat Edaran Nomor 896.223/Diskoimfo-Pdg/ 2020 tentang Penggunaan Surat Elektronik bagi Pimpinan, Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

